

---

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM PROSEDUR UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TERNATE MALUKU UTARA**

***THE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM PROCEDURE MONEY SUPPLIES AND A CHANGE  
OF MONEY ON THE WORK OF THE PUBLIC CITY TERNATE NORTH MALUKU PROVINCE***

Oleh:

**Hady Kharitzah Raja<sup>1</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

<sup>1</sup>[hadykharitzahraja@gmail.com](mailto:hadykharitzahraja@gmail.com)

**Abstrak:** Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK Kepala Daerah tentang besaran UP. Pada saat Uang Persediaan telah terpakai Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-GU dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan Uang Persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu. PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI No 55 Tahun 2008 telah memberikan Peraturan yang detail tentang Penatausahaan dan Penyusunan Uang Persediaan serta Ganti Uang Persediaan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan sistem prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang Dinas PU Kota Ternate sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif untuk membahas permasalahan yang sifatnya menguraikan, membandingkan, suatu data atau keadaan, melukiskan dan menerangkan hasil penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata kunci:** Bendahara Pengeluaran, Uang Persediaan, Ganti Uang

**Abstract:** Spending Treasurer filed SPP-UP the beginning of each fiscal year after the issuance of the Decree on the magnitude Regional Head UP. At the time of Money Supply has been used Spending Treasurer may submit SPP-GU with a number of different use of Money Supply SPJ which has been passed in a specific time period. PERMENDAGRI No. 13 of 2006 and PERMENDAGRI No 55 of 2008 has given a detailed regulation on the administration and preparation of Money Supply and Change of Money Supply. The purpose of this study was to determine and analyze whether the implementation of the system procedure Change Money and Money Supply of Public Works Department Ternate is in compliance with applicable regulations. The analysis method used in this research using descriptive analysis method to discuss problems that are describing, comparing, a data or state, describe and explain the results of research that can be deduced. The results showed that the Public Work Department of Ternate City in accordance with applicable regulations.

**Keywords:** Treasurer, Money Supply, Change Money

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sehubungan dengan semakin arifnya para pelaku dalam pengambilan keputusan ekonomi serta ditunjang perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, maka peran akuntansi sebagai informasi keuangan menjadi sangat penting dalam kehidupan perekonomian, khususnya dalam bidang pemerintahan. Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan, pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri.

Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) dan / atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Pelaksanaan realisasi anggaran dapat dijadikan acuan untuk mengetahui sejauh manakah anggaran tersebut dipergunakan. SKPD juga dituntut harus memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan UU dan Peraturan yang berlaku agar sesuai dengan pelaksanaan realisasinya.

Peraturan mengenai penatausahaan keuangan daerah mengacu pada beberapa peraturan perundang – undangan yaitu antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut yang di dasarkan dengan beberapa materi tentang bagaimana permasalahan yang sering muncul dalam penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah untuk SKPD.

### Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui serta menganalisis Sistem dan Prosedur Penerapan Uang Persediaan dan Ganti Uang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Akuntansi.

Sujarweni dan Wiratna (2015) menyatakan bahwa akuntansi sebagai kegiatan penyediaan jasa mengisyaratkan bahwa akuntansi yang akhirnya harus diterapkan untuk merancang dan menyediakan jasa berupa informasi keuangan harus bermanfaat untuk kepentingan sosial dan ekonomik negara tempat akuntansi diterapkan.

Halim dan Kusufi (2012: 36) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi / entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang memerlukan.

### **Akuntansi Sektor Publik**

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2011) Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini telah terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga – lembaga pemerintah, perusahaan milik negara / daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa – masa sebelumnya. Terhadap tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dari akuntabilitas publik oleh lembaga – lembaga sektor publik

### **Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Ick Rangga Bawono, Mochamad Novelsyah (2011), Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga – lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2011) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak – pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

### **Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, pasal 1, butir 5). Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

### **Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 (2006 : 81) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

### **Uang Persediaan**

Ick Rangga Bawono, Mochamad Novelsyah (2011) Uang Persediaan (UP) merupakan uang muka kerja dari BUD kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiananya (revolving) Uang Persediaan (UP) dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari – hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

**Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian oleh Andrew Marco Saputra (2013), dalam penelitiannya berjudul Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas pada BPBD SULUT. Metode peneliti yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada BPBD Provinsi Sulut sudah sesuai dengan aturan. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa Hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas sudah sesuai dengan undang – undang.
2. Penelitian oleh Iren Tessa Kapoh (2011), dalam penelitiannya berjudul Evaluasi pelaksanaan Sistem dan Perosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan pada Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Manado. Tujuannya untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. Metode penelitian menggunakan Metode deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis menunjukan penelitiannya yaitu pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas sudah sesuai dengan undang – undang.
3. Penelitian oleh Rachmat Sandy Ramadhan dan Akie Rusaktiva Rustam (2013) dalam penelitiannya berjudul Analisis Penyajian Laporan Keuangan yang diterapkan pemerintah kabupaten tungagung. Tujuannya adalah untuk mengetahui Sistem Penyajian Keuangan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Tulungagung. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan komponen Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Tulungagung telah mengikuti SAP No. 71 Tahun 2010 (Lampiran II). Namun pada Laporan Realisasi Anggarannya, pada penyajian pos pembiayaan masih belum dikonversi menurut SAP dan masih mengikuti klasifikasi atau pemberian nama pos menurut permendagri atau menurut pos pembiayaan didalam APBD pemkab Tulungagung
4. Penelitian oleh Siti Maryam, Jantje J Tinangon / Inggriani Elim (2014), dalam penelitiannya berjudul Evaluasi penerapan Akuntansi untuk belanja modal berdasarkan peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pada Dina PU Kota Manado. Tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi untuk belanja modal yang di dasarkan pada pemerinta no 71 tahun 2010 pada dinas PU Kota Manado. Hasil penelitian menunjukan Akuntansi untuk belanja modal pada Dinas PU Kota Manado sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Sebaiknya pimpinan Dinas PU Kota Manado menambah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang akuntansi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat untuk meningkatkan kinerja institusi
5. Penelitian Oleh Dedi Priansyah, Lewi Malisan, Dwi Risma Deviyanti (2012), dalam penelitian berjudul Analisis Penatausahaan Anggaran Belanja Pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur Untuk mengetahui tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Instansi BKKBN & pelaksanaan penatausahaan BKKBN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan dengan melakukan analisa Penatausahaan Belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 berlandaskan pada Permendagri 13 Tahun 2006, ditemukan tiga kelemahan dan permasalahan yang dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dhika Perman (2013), dalam penelitian berjudul Analisis Penerapan Sistem & Prosedur Penatausahaan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran Dinas Pajak Daerah & Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerinta Kota Yogyakarta & pelaksanaa sistem dan prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran dinas pajak daerah dan pengelolaan keuangan daerah pemerintah kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerimaan dinas pajak daerah dan pengelolaan keuangan sudah menerapkan sistem dan prosedur penatausahaan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman yang berlaku dari tahap awal pengumpulan bukti – bukti transaksi sampai pada tahap pengesahan dan penyampaiaan kepada pihak – pihak terkait & Bendahara pengeluaran dinas pajak daerah dan pengelolaan keuangan pemerinatah kota Yogyakarta sudah menerapkan sistem dan penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman yang berlaku dari tahap pembukuan belanja hingga uraian prosedur keseluruhan penyampaian pertanggungjawaban.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat Deskriptif. Mulyadi (2011 : 19) metode Penelitian Deskriptif dalam kajian metodologi penelitian ini selalu dikaitkan dengan persoalan tujuan penelitian. Penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Metode penelitian Deskriptif mempunyai dua ciri pokok yaitu Memusatkan perhatian pada masalah – masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah yang bersifat aktual dan Menggambarkan fakta – fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional. Penelitian ini pada akhirnya akan menghasilkan laporan deskriptif.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian yang diteliti penulis bertempat di Jalan Kihajar Dewantoro, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2016.

### Jenis Dan Sumber Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu jenis data, sumber data dan teknik pengumpulan data.

#### 1. Jenis Data

Data merupakan kumpulan fakta yang diyakini kebenarannya, yang dihasilkan dari pengamatan, pengukuran, atau pencacahan. Karakteristik objek data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. Data kualitatif  
Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate karena merupakan Kuasa Pengguna Anggaran sehingga data penelitian berupa opini, sikap dan pengalaman pelaksanaan tersebut merupakan objek.
- b. Data Kuantitatif.  
Yaitu jenis data dalam bentuk dokumen berupa laporan keuangan daerah. Buku – buku, artikel, dan peraturan perundang – undangan.

#### 2. Sumber Data

- a. Data primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu individu atau perseorangan yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner. Data primer yang digunakan penulis merupakan hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan pihak – pihak terkait.
- b. Data sekunder  
Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dengan baik oleh pihak pengumpul dan primer atau pihak lain.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Metode Wawancara.  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak instansi yang terkait dalam hal ini Dinas PU Kota Ternate.
- b) Metode Dokumentasi.  
Dalam melakukan observasi dokumen, penulis mengamati data – data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang berkenaan dengan Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang dalam Dinas PU Kota Ternate.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode Deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono 2011 :21).

### **Teknik Analisis Data**

- a. Mengambil data – data keuangan seperti informasi dan pengelolaan asset dari daerah yang dapat dijadikan penelitian.
- b. Mengambil landasan – landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menganalisa langkah – langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan asset daerah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Evaluasi atas Uang Persediaan (UP) Dan Ganti Uang (GU)**

Sistem Pengeluaran Kas atas Uang Persediaan (UP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate dengan fungsi yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk membuat surat permohonan SPD (Surat Penyediaan Dana), membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) beserta rincian kelengkapan dokumennya, menguji dan meneliti kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya, pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) yang telah memenuhi syarat kelengkapan dokumen, dibuat rancangan untuk diotorisasi lengkap dan tidaknya dokumen, untuk dokumen yang tidak lengkap akan ditolak dan dikembalikan untuk dilengkapi, dokumen yang dinyatakan lengkap disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan diajukan ke BUD untuk di terbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Sistem Pengeluaran Kas atas Ganti Uang (GU) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate dengan fungsi yang dilaksanakan, adanya Usulan Anggaran, diterbitkannya SPD (Surat Penyediaan Dana), bukti – bukti atas belanja Uang Persediaan, menginput ke dalam perangkat komputer untuk dibuatnya SPJ (Surat PertanggungJawaban) untuk dikeluarkannya SPP (Surat Perintah Pembayaran) atas Ganti Uang (GU) beserta rincian yang ada, pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) berdasarkan kelengkapan atas SPP (Surat Perintah Pembayaran) untuk dokumen yang tidak lengkap akan dikembalikan dan diotorisasi, dokumen yang dinyatakan lengkap akan akan dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) paling lambat 1 sejak SPP diterima, untuk selanjutnya ditanda tangani untuk diajukan ke pengguna anggaran untuk dikeluarkannya atau diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atas GU (Ganti Uang).

#### **Evaluasi Mekanisme Pengeluaran Kas atas Uang Persediaan (UP)**

Mekanisme Pengeluaran atas Uang Persediaan (UP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate hanya dapat digunakan untuk pengeluaran rutin SKPD dan Pengeluaran Pengeluaran pada program dan kegiatan belanja atas barang maupun jasa. Untuk Uang Persediaan yang telah terpakai akan diisi kembali menggunakan mekanisme Ganti Uang (GU).

Adapun pengeluaran – pengeluaran rutin SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yang tertata dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) periode Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
- c. Penyediaan bahan bacaan & Peraturan Perundang – undangan
- d. Penyediaan atas beban – beban administrasi perkantoran
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran
- f. Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya

Besaran Uang Persediaan (UP) tiap – tiap SKPD di tetapkan atas SK Walikota berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di

Pemerintahan Kota Ternate Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah “Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2015, tentang Penjabaran APBD”. Untuk Uang Persediaan ini diberlakukan pada tahun anggaran berjalan.

### **Evaluasi Dokumen yang Diperlukan**

Dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas atas Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Ganti Uang (GU) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate sudah cukup baik dan digunakan sebagaimana mestinya. Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan permintaan dari SKPD dikeluarkan oleh PPKD selaku BUD. Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh pengguna anggaran sebagai persetujuan pencairan dana diverifikasi oleh PPK-SKPD.

### **Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas**

Prosedur Pengeluaran Kas atas Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate telah membentuk sistem dan sesuai dengan Flow Chart yang baku, namun seringkali terjadi keterlambatan atas penerapan pada masing – masing unit kerja. Untuk tiap unit kerja sendiri memiliki *SOP (Standar Operation Procedure)* sehingga jikalau ada keterlambatan maka itu disebabkan oleh stafnya sendiri dan kemungkinan lainnya masalah terhadap jaringan atas sistem. Melihat dari Evaluasi atas Uang Persediaan, Evaluasi Mekanisme Pengeluaran Kas atas Uang Persediaan (UP), Evaluasi Dokumen yang diperlukan, Serta Evaluasi Prosedur Pengeluaran, bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ternate telah mengikuti sistem prosedur yang berlaku secara tatanan berdasarkan Undang – undang yang berlaku saat ini serta kesesuaiannya terhadap para ahli dalam pengeluaran kas daerah atas Uang Persediaan (UP) maupun Ganti Uang (GU). Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate mengikuti Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Kota Ternate saat ini tentang Prosedur pengeluaran Kas yaitu PERATURAN WALIKOTA Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD. Pencatatan dalam setiap transaksi pengeluaran kas atas Uang Persediaan (UP) maupun Ganti Uang (GU) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate sudah menggunakan catatan akuntansi secara komputerisasi dengan melalui aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Keuangan versi 2.1 oleh BPKB, yang dimana semua jurnal maupun neraca bisa langsung dicetak.

### **Pembahasan**

#### **Penetapan Besaran Uang Persediaan SKPD**

Untuk penggunaan Uang Persediaan dalam SKPD di Dinas PU Kota Ternate, Uang persediaan yang di terapkan Dinas PU Kota Ternate di tetapkan berdasarkan SK Wali Kota tentang besaran UP di setiap SKPD, hal ini dilakukan sekali selama dalam setiap awal tahun anggaran. Dalam hal ini tidak seperti Ganti Uang (GU) yang dilakukan berulang – ulang dalam setiap tahun anggaran. Uang persediaan sendiri dipergunakan untuk mengisi uang muka SKPD dalam menjalankan kegiatan operasional sehari – hari selama satu tahun anggaran

#### **Penerapan Prosedur Uang Persediaan (UP).**

diterbitkannya Surat Penyediaan Dana (SPD), dalam hal ini dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas PU Kota Ternate. Pengguna anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK-PU. Berdasarkan SPD tersebut bendahara Dinas PU Kota Ternate membuat Surat Permintaan Pembayaran untuk Uang persediaan atau biasa disebut dengan SPP-UP beserta rincian dokumen lainnya yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan dan rincian, salinan SPD, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran dan lampiran lain seperti daftar rincian rencana penggunaan dana s/d jenis belanja. Bendahara pengeluaran Dinas PU Kota Ternate kemudian menyerahkan SPP-UP beserta dokumen lain kepada PPK-PU untuk diteliti kelengkapan dokumen SPP-UP dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-PU. Untuk selanjutnya diajukan ke PPK-PU untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Uang Persediaan. Untuk pembuatan SPM-UP dilakukan atau dibuat ketika telah memenuhi syarat atau kelengkapan dari SPP-UP, setelah syarat atau kelengkapan telah terpenuhi barulah dibuatnya SPM-UP oleh PPK-PU, setelah itu dibuat rancangan untuk SPM-UP kemudian register setela itu SPM-UP diotorisasi oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

Anggaran dan diterbitkanlah SPM-UP, untuk penerbitan SPM-UP dilakukan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima. Untuk kelengkapan / syarat SPP-UP yang dinyatakan tidak lengkap, dibuatkan Surat Penolakan SPM-UP yang dilakukan oleh PPK-PU kemudian di kembalikan kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi dan di lengkapi sebelum diserahkan kembali kepada PPK-PU untuk pengajuan penerbitan ulang SPM-UP. Untuk penolakan SPM-UP sendiri dilakukan paling lambat sejak SPP diterima. Setelah Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) dikeluarkan dan diterbitkan kemudian langsung ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU Kota Ternate dan setelah itu diajukan ke BUD untuk dikeluarkannya atau diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP).

### **Penerapan Prosedur Ganti Uang (GU)**

Untuk Ganti Uang sendiri dapat diajukan ketika Uang Persediaan (UP) telah dikeluarkan, dalam hal ini dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Pengeluaran untuk Uang Persediaan (UP) di setiap SKPD. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota ternate menerapkan proses dalam mengajukan Ganti Uang (GU) yaitu sebagai berikut :

- Adanya usulan Anggaran Kas perbulan
- Setelah itu di terbitkannya Surat Penyediaan Dana untuk Ganti Uang (GU) perbulan
- Membelanjakan Uang Persediaan yang telah dikeluarkan dengan menggunakan bukti – bukti seperti Kwitansi Pembayaran sebagai Bukti Penerimaan Keuangan (BPK) dengan lampiran – lampirannya, bisa juga menggunakan Nota, Kwitansi, atau yang lainnya.
- Setelah itu diinput ke aplikasi dengan menggunakan perangkat komputer dan kemudian dibuatlah Surat PertanggungJawaban untuk Ganti Uang (SPJ-GU)
- Setelah dibuatnya Surat PertanggungJawaban Ganti Uang (SPJ-GU) kemudian diajukan ke PPK-PU yaitu Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Setelah itu dikeluarkan dan diterbitkannya SPP-GU. Untuk lampiran dari SPP-GU terdiri dari SPJ dan bukti – bukti kwitansi yang ada. Sedangkan untuk rincian SPP-GU terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan, dan Uraian. Untuk membuat SPM-GU, PPK-PU meneliti kelengkapan atas SPP-GU berdasarkan SPD dan DPA-PU, apabila SPP-GU dinyatakan lengkap maka PPK-PU membuat SPM-UP paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-UP diterima. Rancangan SPM ini kemudian diberikan PPK-PU kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi. Jika SPP-GU dinyatakan tidak lengkap, PPK-PU akan menerbitkan surat penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-GU diterima. Surat penolakan Penerbitan SPM ini kemudian diberikan PPK-PU kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi. Surat penolakan penerbitan SPM diberikan kepada bendahara agar bendahara melakukan penyempurnaan SPP-GU. Setelah Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) dikeluarkan dan diterbitkan kemudian ditanda tangani oleh Kepala Dinas untuk diajukan ke BUD atau pengguna anggaran untuk dikeluarkannya atau diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana untuk Ganti Uang (SP2D-GU).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan sistem dan prosedur Uang Persediaan dan Ganti Uang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang saat ini digunakan. Bendahara penerimaan maupun pengeluaran telah melakukan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta pencatatan atas Uang Persediaan dan Ganti Uang yang dimana hal ini juga sudah berdasarkan atau sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008.

Masalah – masalah yang sering dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate yaitu dalam melaksanakan PERMENDAGRI Nomor 55 tahun 2008 yaitu seperti kekeliruan dalam hal pelaksanaan pencatatan prosedur yang terkadang harus menyamping dalam hal tersebut, kesalahan dalam pencatatan atas kekeliruan yang dihadapi dalam hal ini biasanya terjadi pada SKPDnya sendiri, keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang menyebabkan kinerja Dinas tidak maksimal.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal penyusunan maupun pencatatan atas Uang Persediaan dan Ganti Uang dengan menggunakan sistem operasi komputer berbasis aplikasi sebaiknya lebih dipelajari untuk cara kerja dari aplikasi tersebut.
2. Untuk kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate harus melakukan pengawasan maupun pengontrolan secara teratur dan konsistensi terhadap SKPD – SKPD agar kinerja atas kegiatan operasional dapat lebih dimaksimalkan.
3. Untuk standart penetapan penerimaan pegawai terutama dibagian keuangan, ada baiknya mengutamakan pegawai yang memiliki kemampuan ataupun keahlian dengan latar belakang pendidikan akuntansi.
4. Pemerintah harus melakukan peningkatan kualitas dalam sumber daya manusia melalui penddikan maupun pelatihan formal dan nonformal
5. Melakukan penambahan dan pelayanan kualitas atas peralatan yang digunakan dalam pengoperasian kegiatan SKPD agar lebih dipermudahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Salemba
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. (2011). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokus Media
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pembantu SKPD serta penyampaiannya*
- Icuk Rangga Bawono, Mochamad Novelsyah. (2011). *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD*. Salemba Empat.
- Mulyadi, (2013), *Sistem Akuntansi*. Jakarta, Salemba Empat.
- Permana, Dhika, (2013), “Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/17827>, 10 Mei 2016.
- Priansyah Dedi, Malisan Lewi, Deviyani Risma Dwi, (2012), “Analisis Penatausahaan Anggaran Belanja pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur”, *Journal*, Vol.1 No.1, <http://id.portalgaruda.org>. 10 Mei 2016.
- Rachamat Sandy Ramadhan dan Akie Rusaktiva Rustam, (2013), “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, *Journal*, “<http://jimfeb.ubac.id/index.php/jimfeb/article/view/902>. 10 Mei 2016.
- Saputra, Andrew Marcow, (2013), “Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada BPBD SULUT”, *Jurnal EMBA*, Vol 1. No.3, <Http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba/Article/View/>, 10 Mei 2016
- Sujarweni, Wiratna, 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung.